

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi merupakan unsure penting dalam proses pembangunan nasional dan wilayah di Indonesia. Wilayah yang dimaksud disini dapat berbentuk provinsi, kabupaten, ataukota. Tidak dapat disangkal bahwa pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi sampai saat ini masih merupakan target utama dalam penyusunan rencana pembangunan nasional dan daerah di samping pembangunan fisik dan sosial. Sedangkan, target pertumbuhan ekonom itersebut ternyata sangat bervariasi isesuai dengan potensi ekonomi yang dimiliki oleh masing-masing wilayah. Melalui pertumbuhan ekonomi wilayah yang cukup tinggi diharapkan kesejahteraan masyarakat secara bertahap akan dapat pula ditingkatkan.¹

Perhatian terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah semakin meningkat dalam era otonomi daerah. Hal ini cukup logis, karena dalam era otonomi tersebut masing-masing daerah berlomba-lomba meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerahnya guna mendorong perbaikan kemakmuran masyarakat setempat. Karena itu, pembahasan tentang struktur dan faktor pertumbuhan ekonomi daerah akan sangat penting artinya bagi pemerintah daerah dalam

¹Sjafrizal, *Ekonomi Wilayah dan Perkotaan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 88-89.

menentukan kebijakan dan upaya yang dapat dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di daerahnya masing-masing.²

Aspek makro yang pertama yang sangat penting dibahas menyangkut dengan pertumbuhan ekonomi daerah yang pada dasarnya merupakan peningkatan kemampuan produksi yang terdapat pada daerah yang bersangkutan. Alasannya karena pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu unsure penting dalam peningkatan proses pembangunan daerah. Tidak berlebihan kiranya bila dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah tersebut adalah motor penggerak utama dalam proses pembangunan daerah.³

Realisasi pertumbuhan ekonomi daerah dapat diukur dengan menggunakan peningkatan nilai *Produk Domestik Regional Bruto*(PDRB) dengan harga konstan dari satu periode ke periode waktulainnya. PDRB harga konstan sengaja digunakan dalam perhitungan tidak termasuk kenaikan harga (inflasi). Di samping itu, pertumbuhan ekonomi daerah ini juga dapat dihitung untuk masing-masing sektor dan subsektor sesuai dengan data yang tersedia. Analisis pertumbuhan ekonomi daerah ini pada satu segi dapat digunakan sebagai salah satu indikator untuk penilaian keberhasilan pembangunan ekonomi bersangkutan. Sedangkan, pada segi lain, perkiraan pertumbuhan ekonomi daerah dapat juga dijadikan sebagai dasar untuk melakukan prediksi sasaran dan target pertumbuhan ekonomi daerah untuk masa mendatang yang cukup realitas sesuai kemampuan dimasalalu.⁴

²Sjafrizal, *Ekonomi Wilayah dan Perkotaan*, 89.

³Sjafrizal, *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 201), 70.

⁴Sjafrizal, *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*, 70-71.

Padatanggal 1 januari 2001 yang lalu, Pemerintah Republik Indonesia secara resmi telah dinyatakan dimulainya pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan UU No. 22 Tahun 1999 yang kemudian direvisi dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999, yang kemudian direvisi dengan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah dan Pusat. Sejak mulai saat itu, pemerintah dan pembangunan daerah di seluruh nusantara telah memasuki era baru yaitu era otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Sistem pemerintah dan pembangunan daerah lama yang sangat sentralisasi dan didominasi oleh pemerintah pusat mulai ditinggalkan. Sedangkan pemerintah daerah diberiwewenang dan sumber keuangan baru untuk mendorong proses pembangunan di daerahnya masing-masing yang selanjutnya akan mendorong pula proses pembangunan nasional.⁵

Hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah, atau dalam arti yang lebih sempit sering juga disebut sebagai perimbangan keuangan pusat dan daerah merupakan salah satu bentuk hubungan dari sekian banyak hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Unikny hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah ini merupakan topik hangat yang sering muncul ke permukaan dan bahkan berpotensi menjadi pemicu perpecahan bangsa. Persoalannya mudah ditebak, yaitu adanya daerah yang kurang puas dan merasa diperlakukan tidak adil dalam pembagian keuangan oleh pemerintah pusat. Munculnya berbagai gerakan separatis yang

⁵Sjafrizal, *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*, 105

ingin memisahkan diri dari pangkuan ibu pertiwi akhir-akhir ini sedikit banyak juga disebabkan oleh masalah keuangan.⁶

Aturan keuangan pusat dan daerah, pada satu sisi mendukung pelaksanaan pembangunan nasional, di sisi lain untuk memfasilitasi proses pembangunan daerah, yang dijalankan dibawah skema otonomi daerah. Sudah tentu otonomi daerah bukan kemerdekaan. Dan proses pengaturan oleh pusat tidak dimaksudkan untuk mengembalikan sentralisme otoriter. Perimbangan dimaksud agar terjadi keadilan dalam pembagian sumber daya bagi kepentingan nasional dan bagi kepentingan daerah. Skema otonomi, pada dasarnya bukan sekedar mengenai pengaturan kembali hubungan kekuasaan melainkan juga perlu menyentuh dimensi pembiayaan (ekonomi). Pemisah antara kebijakan pemerintah dan masalah perimbangan kekuasaan, telah dibaca oleh banyak kalangan sebagai siasat pusat, untuk tetap memegang kendali meskipun telah menyuarakan konsep otonomi. Dengan kontrol anggaran belanja dan pendapatan, maka bisa dipastikan, banyak inisiatif yang akan kandas, dan pada gilirannya, akan menengadahkan tangan pada pusat.⁷

Masalah hubungan keuangan pusat dan daerah erat kaitannya dengan asas penyelenggaraan pemerintah di daerah, sebagai latar belakang timbulnya hubungan keuangan pusat daerah, yaitu desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Hubungan keuangan dan daerah dalam rangka otonomi daerah dilakukan

⁶Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,2004), 1

⁷ Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah di Indonesia*, 3.

dengan memberikan fungsi secara efektif. Untuk melaksanakan fungsi tersebut harus ada dukungan sumber-sumber keuangan yang memadai baik yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah maupun lain-lain penerimaan yang sah.⁸

Menurut Boediono pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Jadi, presentase pertambahan output ini harus lebih tinggi dari presentase pertambahan jumlah penduduk dan ada kecenderungan dalam jangka panjang bahwa pertumbuhan itu akan berlanjut. Menurut Boediono ada ahli ekonomi yang membuat definisi yang lebih ketat, yaitu bahwa pertumbuhan itu haruslah bersumber dari proses intern perekonomian tersebut. Ketentuan terakhir ini sangat penting diperhatikan dalam ekonomi wilayah, karena bisa saja suatu wilayah mengalami pertumbuhan tetapi pertumbuhan itu tercipta karena banyaknya bantuan atau suntikan dana dari pemerintah pusat dan pertumbuhan itu terhenti apabila suntikan dana itu dihentikan. Stabilitas ekonomi makro merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, kondisi perekonomian daerah diharapkan terpeliharaan melalui sinergi antara kebijakan fiskal daerah serta penguatan kelembagaan keuangan mikro di sektor riil. Harapan dan keyakinan terhadap kondisi tersebut didasarkan pada proyeksi optimis perbaikan perekonomian nasional seiring dengan perbaikan pertumbuhan ekonomi. Asumsi yang

⁸Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah di Indonesia*, 39

digunakan adalah kenaikan laju pertumbuhan ekonomi nasional tahun berjalan.⁹

Nilai LPE menggambarkan kondisi perekonomian nasional, yang berdampak terhadap transfer daerah ditahun berikutnya akan meningkat, dengan asumsi bahwa celah fiskal Kota Cilegon masih menunjukkan nilai positif.

Tabel 1.1 Pertumbuhan Ekonomi dan Realisasi Penerimaan Dana Alokasi Umum Kota Cilegon Tahun 2008-2015 ¹⁰

Tahun	Pertumbuhan ekonomi %	Dana Alokasi Umum (DAU) (Ribu Rupiah)
2008	5,02	251.936.625
2009	4,83	295.333.787
2010	5,36	279.127.685
2011	6,62	315.682.508
2012	7,70	405.584.438
2013	6,81	461.398.284
2014	5,32	490.917.599
2015	4,81	514.376.024

Pada tabel 1.1 diatas dapat dilihat bahwa setiap tahunnya Pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2012 yakni mencapai 7,70%, dan dalam

⁹Robison Tarigan, *Ekonomi Regional Teori Dan Aplikasi*, (Jakarta: PT bumi Aksara, 2007), 46.

¹⁰[www. BpsCilegon.go.id](http://www.BpsCilegon.go.id) dan www.djpk.kemendagri.go.id (diundulpada 20 Desember 2016).

realisasi penerimaan dana alokasi umum yang diterima Kota Cilegon dari pemerintah pusat juga mengalami peningkatan tetapi pada tahun 2010 dana alokasi umum (DAU) yang diterima kota cilegon mengalami penurunan sedangkan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2010 mengalami peningkatan yaitu dari 4,83% ditahun 2009 menjadi 5,36% ditahun 2010.

Berdasarkan pemikiran tersebut diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap “PENGARUH DANA ALOKASI UMUM TERHADAP PERKEMBANGAN EKONOMI KOTA CILEGON TAHUN 2008-2015” yang mendorong minat dan gagasan serta mengangkatnya menjadi sebuah bahan dan judul skripsi sebagai tugas akhir jenjang S1 yang sedang ditempuh.

B. Rumusan Masalah

Untuk memudahkan melakukan penelitian mengenai pengaruh dana alokasi umum (DAU) terhadap pertumbuhan di kota Cilegon, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah DAU berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Cilegon?
2. Berapa besarkah pengaruh DAU terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Cilegon?

C. Pembatasan Masalah

Agar masalah lebih terfokus dan spesifik, maka penulis membatasi permasalahan yang akan diteliti, penulis hanya meneliti tentang bagaimana pengaruhnya dana alokasi umum pada tahun 2008 sampai 2015 terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Cilegon.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka penulis melakukan penelitian ini dengan tujuan.

1. Untuk mengetahui apakah DAU berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Cilegon.
2. Untuk mengetahui berapakah besar pengaruh DAU terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Cilegon.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan adalah :

1. Bagi Penulis

Dapat memperdalam pengetahuan dan ilmu serta wawasan mengenai dana alokasi umum dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dikota Cilegon. Sebagai sarana untuk melakukan evaluasi dan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik dimasa yang akan datang.

2. Bagi Pemerintahan suatu wilayah

Penulis berharap dari penelitian ini dapat berguna bagi pengembangan ilmu dan pengetahuan. Sebagai kontribusi positif dalam rangka menyediakan informasi tentang lembaga yang dituju. Dan dapat memberikan dampak yang baik bagi pertumbuhan ekonomi tersebut.

3. Bagi pihak lain

Diharapkan dapat dijadikan sebagai studi perbandingan dalam rangka mengkaji ilmu pengetahuan. Dapat dijadikan referensi untuk penelitian berikutnya yang lebih baik lagi

bagi sivitas akademik IAIN “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten, khususnya bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

F. Kerangka Pemikiran

Kinerja perekonomian suatu daerah pada umumnya dinilai berdasarkan pencapaian angka laju pertumbuhan ekonomi (LPE) daerah tersebut. Pada suatu daerah yang tergolong sebagai daerah berkembang, angk LPE cenderung masih dapat didorong menjadi lebih tinggi setiap tahunnya. Sedangkan pada daerah yang tergolong maju angka LPE cenderung kecil dan stagnan karena biasanya kapasitas produksi sudah digunakan secara maksimal, terlebih untuk wilayah yang mengandalkan sektor industri pengolahan sebagai roda penggerak perekonomiannya. Pertumbuhan ekonomi sendiri menunjukkan tingkat aktivitas perekonomian yang menghasilkan tambahan masyarakat pada suatu priode tertentu. Karena pada dasarnya aktivitas perekonomian adalah suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan output, maka proses ini pada gilirannya akan menghasilkan suatu balas jasa terhadap faktor produksi yang dimiliki masyarakat.¹¹

Ada empat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu masyarakat (negara) yaitu:¹²

¹¹BPS (Badan Pusat Statistik) <https://cilegonkota.bps.go.id> (diunduh tanggal 17 maret 2017).

¹²Lincoln Arsyad, *Ekonomi Pembangunan*, (Yogtakarta: STIM YKPN Yogyakarta, 2010), 269-270

1. Akumulasi modal, termasuk semua investasi baru yang berwujud tanah (lahan), peralatan fisik dan sumber daya manusia
2. Pertumbuhan penduduk
3. Kemajuan teknologi
4. Sumber daya institusi (sistem kelembagaan)

Menurut Boediono “pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang”. Jadi, persentase pertambahan output itu haruslah lebih tinggi dari persentase pertambahan jumlah penduduk dan ada kecenderungan dalam jangka panjang bahwa pertumbuhan itu akan berlanjut. Menurut Boediono ada ahli ekonomi yang membuat definisi yang lebih ketat, yaitu bahwa pertumbuhan itu haruslah “bersumber dari proses intern perekonomian tersebut”. Ketentuan terakhir ini sangat penting diperhatikan dalam ekonomi wilayah, karena bisa saja suatu wilayah mengalami pertumbuhan tetapi pertumbuhan itu tercipta karena banyaknya bantuan atau suntikan dana dari pemerintah pusat dan pertumbuhan itu terhenti apabila suntikan dana itu dihentikan.¹³

Suntikan dana atau pendapatan transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah disebut juga sebagai dana perimbangan, salah satu dana perimbangan yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yakni dana alokasi umum (DAU).

DAU merupakan *block grant* yang diberikan kepada semua kabupaten dan kota untuk tujuan mengisi kesenjangan antara kapasitas dan kebutuhan fiskalnya, dan didistribusikan dengan

¹³Robinson Tarigan, *Ekonomi Regional teori dan aplikasi*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2007), 46.

formula berdasarkan prinsip-prinsip tertentu yang secara umum mengindikasikan bahwa daerah miskin dan terbelakang harus menerima lebih banyak dari pada daerah kaya. Dengan kata lain, tujuan penting alokasi DAU adalah dalam kerangka pemerataan kemampuan penyediaan pelayanan publik antar pemda di Indonesia.¹⁴

G. Sistematika Pembahasan

Untuk penyusunan penelitian ini, pembahasan dibagi menjadi lima bab yang memuat ide-ide pokok yang kemudian dibagi lagi menjadi sub bab, sehingga secara keseluruhan menjadi satu kesatuan yang saling menjelaskan satu pemikiran. Sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, berisikan latar belakang masalah dalam penulisan skripsi, perumusan dan pembatasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, hipotesis, dan sistematika pembahasan.

BAB II Landasan Teori, berisikan pembahasan mengenai pengertian alokasi umum, pengukuran dana alokasi umum, pengelolaan dana alokasi umum, pengertian pertumbuhan ekonomi, konsep dan pengukuran pertumbuhan ekonomi, sumber pertumbuhan ekonomi, teori-teori pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan ekonomi dalam Islam.

BAB III Metodologi Penelitian, berisikan pembahasan mengenai ruang lingkup penelitian, jenis dan sumber data, teknik

¹⁴Mudrajad Kuncoro, *Otonomi Daerah Menuju Era Baru Pembangunan Daerah Edisi 3*, (Jakarta: Erlangga, 2014), 63

pengumpulan data, metode analisis data, dan operasional variabel penelitian.

BAB IV Hasil Penelitian, berisikan mengenai pembahasan gambaran umum objek penelitian, dan analisis hasil penelitian.

BAB V Kesimpulan dan Saran, berisikan mengenai uraian kesimpulan dari hasil yang telah dilakukan dan memberikan saran yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas untuk memperoleh solusi untuk permasalahan tersebut.